



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa berhubung dengan itu, Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968](#) tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
  4. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973](#) tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
  5. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
  6. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998](#) tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3749);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

### Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :
  - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
  - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 14.385.559.007.733,00 (empat belas triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari :
  - a. Penerimaan pajak sebesar Rp 70.934.265.249.868,00 (tujuh puluh triliun sembilan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 30.558.964.493.420,00 (tiga puluh triliun lima ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.782.242.961.896,00 (sepuluh triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan Pasal ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 127.968.487.756.083,00 (seratus dua puluh tujuh triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas :

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 89.609.807.882.252,00 (delapan puluh sembilan triliun enam ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dirinci menurut sektor :

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	71.131.486.063,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	329.839.070.066,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	30.677.781.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	172.096.124.389,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	58.226.098.953.225,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	306.670.073.436,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	159.091.572.645,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	29.999.951.081,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	11.237.938.677.660,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	209.091.134.900,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	4.508.562.994.018,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	297.137.451.937,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	620.936.159.662,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	16.667.440.017,00
15 SEKTOR AGAMA	Rp	1.164.335.582.499,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	350.937.433.578,00
17 SEKTOR HUKUM	Rp	649.763.692.792,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	3.483.574.442.042,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	1.465.034.614.544,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	6.280.223.246.000,00
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 38.358.679.873.831,00 (tiga puluh delapan triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dirinci menurut sektor :		
01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	468.660.982.772,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.837.192.098.953,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	2.138.922.011.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	250.480.023.811,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	6.847.389.026.769,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA		
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	4.807.953.065.412,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	864.319.741.713,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	7.136.798.915.177,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	645.461.136.632,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	4.268.136.385.346,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	348.151.214.200,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp 1.703.139.551.455,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 1.333.362.993.015,00
15 SEKTOR AGAMA	Rp 213.308.717.861,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RP 876.888.719.624,00
17 SEKTOR HUKUM	Rp 153.326.102.730,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	RP 857.870.554.509,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 308.405.806.126,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp 1.918.716.936.494,00

(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

### Pasal 3

Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).

### Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 145



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang senantiasa memperhatikan jiwa dan semangat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 tersebut terdapat Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) sebagai akibat dari lebih besarnya Realisasi Belanja Negara daripada Realisasi Pendapatan Negara.

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp 7.625.198.524.155,00 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Oleh karena dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 mengalami Sisa Anggaran Kurang seperti tersebut di atas, maka Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi sebesar Rp 6.317.742.480.989,00 (enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut :

RINCIAN PENERIMAAN DALAM BEGERI  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998 (dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan	70.934.265.249.868,00
0110 Pajak penghasilan (PPh)	34.388.283.541.950,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)	25.198.773.347.584,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.640.963.276.934,00
0210 Penerimaan bea masuk	2.998.701.033.777,00
0220 Penerimaan cukai	5.101.215.416.292,00
0230 Penerimaan Pajak ekspor/ pungutan ekspor	28.511.741.344,00
0240 Bea meterai	477.816.891.987,00
0250 Bea lelang	-
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam	30.558.964.493.420,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam	30.558.964.493.420,00
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM)	-
Penerimaan negara bukan pajak	10.782.242.961.896,00
0410 Penerimaan pendidikan	69.437.118.872,00
0411 Uang pendidikan	66.533.868.547,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	1.827.818.308,00
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek	4.420.900,00
0419 Penerimaan pendidikan lainnya	1.071.011.117,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana	425.838.729.089,00
0481 Penerimaan pendidikan swadana	425.838.729.089,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	33.674.321.526,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	904.275.455,00
0512 Penjualan hasil peternakan	1.255.072.185,00
0513 Penjualan hasil perikanan	531.370.536,00
0514 Penjualan hasil sitaan	3.386.146.103,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	101.813.059,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan	241.506.708,00





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	hasil cetakan lainnya	
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	17.293.243.957,00
0519	Penjualan lainnya	9.960.893.523,00
0520	Penjualan aset tetap	31.839.165.764,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah	5.328.791.509,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	933.512.645,00
0523	Penjualan sewa beli	22.616.368.765,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	2.960.492.845,00
0530	Penerimaan sewa	12.303.783.694,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.757.313.432,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	3.503.165.069,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	2.580.795.132,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.462.510.061,00
0540	Penerimaan jasa I	887.489.511.674,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	9.845.429.397,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman, museum	2.230.495.397,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	132.325.632.150,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah	174.214.470.218,00
0545	Pemberian hak dan perijinan	531.278.572.453,00
0546	Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	6.909.238.802,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan	9.941.729.425,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama	6.018.505.587,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	14.725.438.245,00
0550	Penerimaan jasa II	692.789.646.158,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	44.270.528.291,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	260.217.451.124,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	4.477.318.758,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil	9.821.823.489,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	4.081.661.087,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	2.299.273.480,00
0557	Pendapatan bea lelang	52.623.472.415,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	37.126.236.452,00
0559	Penerimaan jasa lainnya	277.871.881.062,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	42.118.546.166,00
0561	Bea visa dan paspor	-
0562	Bea konsuler	-
0565	Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan	-
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri	42.118.546.166,00
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan	814.116.973.853,00
0581	Penerimaan penjualan swadana	5.260.921.516,00
0582	Penerimaan sewa swadana	715.849.849,00
0583	Penerimaan jasa swadana	808.140.202.488,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan peradilan	30.332.826.074,00
0611	Legalisasi tanda tangan	84.499.802,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	21.116.550,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	383.803.426,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	22.994.962.401,00
0615	Ongkos perkara	1.656.075.892,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	5.192.368.003,00
0710	Penerimaan dari investasi	5.895.651.053.404,00
0711	Bagian laba dari BUMN	2.340.679.408.293,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	3.554.971.645.111,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	116.566.880.689,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	19.696.988.399,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	34.904.079.044,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	35.353.436.824,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	13.600.684.731,00
0815	Penerimaan kembali belanja	12.955.389.103,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	pembangunan rupiah lainnya	
0816	Pembetulan pembukuan pembayaran Subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh)	56.302.588,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	26.945.230.822,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	5.844.400.752,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	7.858.916.301,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	4.374.253.612,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	2.986.537.992,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	5.871.060.607,00
0826	Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh)	10.061.558,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana	27.470.025.858,00
0881	Penerimaan lain-lain swadana	27.470.025.585,00
0890	Penerimaan lain-lain	1.675.669.148.253,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	3.883.703.994,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	13.523.587.213,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	4.605.651.778,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	347.543.557.104,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya	1.306.112.648.164,00
	JUMLAH	112.275.472.705.184,00

RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998  
(dalam rupiah)

0910	Bantuan Program	-
0920	Bantuan Proyek	14.385.559.007.733,00
	JUMLAH	14.385.559.007.733,00

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998  
(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	71.131.486.063,00
	Jumlah Sektor Industri	71.131.486.063,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	174.027.621.699,00
02.2	Subsektor Kehutanan	155.811.448.367,00
	Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	329.839.070.066,00
03.	SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Dsys Sir	14.452.224.589,00
03.2	Subsektor Irigasi	16.225.557.149,00
	Jumlah Sektor Pengairan	30.677.781.738,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	172.096.124.389,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	172.096.124.389,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	63.528.960.846,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	36.341.760.198,00
05.4	Subsektor Keuangan	58.036.434.121.218,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	89.794.110.936,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	58.226.098.953.225,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	23.392.032.154,00
06.2	Subsektor Transportasi	20.820.474.946,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	Darat	
06.3	Subsektor Transportasi Laut	159.243.954.508,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	55.838.555.672,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	47.375.056.156,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	306.670.073.436,00
<b>07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>		
07.1	Subsektor Pertambangan	154.519.277.930,00
07.2	Subsektor Energi	4.572.294.715,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	159.091.572.645,00
<b>08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI</b>		
08.1	Subsektor Pariwisata	17.853.224.529,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	12.146.726.552,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	29.999.951.081,00
<b>09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI</b>		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	11.172.021.889.487,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	65.916.788.173,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	11.237.938.677.660,00
<b>10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG</b>		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	7.855.024.225,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	201.236.110.675,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	
<b>11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA</b>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>DAN OLAH RAGA</b>		
11.1	Subsektor Pendidikan	4.099.269.558.810,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	306.095.187.330,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	94.375.565.271,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	8.822.682.607,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	4.508.562.994.018,00
<b>12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	297.137.451.937,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	297.137.451.937,00
<b>13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA</b>		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	108.837.119.882,00
13.2	Subsektor Kesehatan	512.099.039.740,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja	620.936.159.622,00
<b>14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	11.072.108.707,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	5.595.331.310,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	16.667.440.017,00
<b>15 SEKTOR AGAMA</b>		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	193.634.336.505,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	970.701.245.994,00
	Jumlah Sektor Agama	1.164.335.582.499,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

<b>16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>		
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	221.988.406.534,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	32.201.239.585,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	2.074.977.412,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	94.672.810.047,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	350.937.433.578,00
<b>17 SEKTOR HUKUM</b>		
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	559.939.900.534,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	89.823.792.258,00
	Jumlah Sektor Hukum	649.763.692.792,00
<b>18 SEKTOR APARATUR NEGARA dan PENGAWASAN</b>		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	3.216.811.400.728,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	266.763.041.314,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	3.483.574.442.042,00
<b>19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA</b>		
19.1	Subsektor Politik	80.042.016.740,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	1.019.855.104.659,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	365.137.493.145,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	1.465.034.614.544,00
<b>20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republi Indonesia	6.024.521.942.000,00
20.3	Subsektor Pendukung Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	255.701.304.000,00 6.280.223.246.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>89.609.807.882.252,00</b>

**RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998  
(dalam rupiah)**

**01 SEKTOR INDUSTRI**

01.1	Subsektor Industri	391.202.640.964,00
	Jumlah Sektor Industri	391.202.640.964,00

**02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

02.1	Subsektor Pertanian	1.414.604.453.633,00
02.2	Subsektor Kehutanan	8.338.993.500,00
	Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	1.422.943.447.133,00

**03 SEKTOR PENGAIRAN**

03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	304.872.077.458,00
03.2	Subsektor Irigasi	834.342.541.986,00
	Jumlah Sektor Pengairan	1.139.214.619.444,00

**04 SEKTOR TENAGA KERJA**

04.1	Subsektor Tenaga Kerja	153.232.607.300,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	153.232.607.300,00

**05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN  
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN  
KOPERASI**

05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	14.215.858.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	70.987.587.733,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	381.371.815.156,00
05.4	Subsektor Keuangan	5.845.389.806,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	161.178.217.055,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	633.598.867.750,00

**06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI  
DAN GEOFISIKA**

06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.251.785.008.258,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	306.131.004.478,00





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

06.3	Subsektor Transportasi Laut	232.527.401.691,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	154.426.829.102,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	17.771.712.000,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	3.962.641.955.529,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	291.839.494.000,00
07.2	Subsektor Energi	774.631.344.280,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	1.066.470.838.280,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	49.113.975.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	29.617.104.000,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	78.731.079.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	5.507.647.420.751,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan	1.111.981.661.496,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	6.619.629.082.247,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	283.883.708.680,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	70.092.151.190,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	353.975.859.870,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	2.945.379.251.932,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	144.977.119.850,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	72.487.029.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	60.251.465.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	3.223.094.865.782,00
<b>12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	343.074.210.930,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	343.074.210.930,00
<b>13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA</b>	
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	196.121.381.100,00
13.2 Subsektor Kesehatan	1.033.224.981.607,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	184.727.601.200,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.414.073.963.907,00
<b>14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	559.873.438.914,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	17.139.023.228,00
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	577.012.462.142,00
<b>15 SEKTOR AGAMA</b>	
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	28.646.477.700,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	153.708.585.670,00
Jumlah Sektor Agama	182.355.063.370,00
<b>16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	180.243.304.347,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	98.247.839.100,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	89.472.192.839,00
16.4 Subsektor Kelautan	83.352.906.500,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	27.442.305.454,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	96.465.821.552,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	575.224.369.792,00
<b>17 SEKTOR HUKUM</b>	
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	8.629.333.400,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	38.652.546.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	103.561.716.330,00
	Jumlah Sektor Hukum	150.843.595.730,00
<b>18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN</b>		
19.1	Subsektor Politik	16.714.264.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	5.467.229.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	96.610.478.000,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	118.791.971.000,00
<b>20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>		
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	875.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	949.745.428.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	45.073.401.020,00
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	995.693.829.020,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.973.120.866.098,00</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
BANTUAN PROYEK/TEKNIS  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998  
(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	77.458.341.808,00
	Jumlah Sektor Industri	77.458.341.808,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	414.248.651.820,00
02.2	Subsektor Kehutanan	-
	Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	414.248.651.820,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	574.891.983.867,00
03.2	Subsektor Irigas	424.815.408.427,00
	Jumlah Sektor Pengairan	999.707.392.294,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	97.247.416.511,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	97.247.416.511,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	-
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	5.707.693.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	-
05.4	Subsektor Keuangan	737.949.644.744,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	2.939.684.000,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	746.597.021.744,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	1.612.164.743.906,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	632.000.667.307,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	436.492.717.827,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	186.890.695.049,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	17.198.247.151,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	2.884.747.071.240,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

07.1	Subsektor Pertambangan	67.232.260.141,00
07.2	Subsektor Energi	3.674.249.966.991,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	3.741.482.227.132,00
08	SEKTOR PARIWISATA. POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	-
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	785.588.662.713,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	785.588.662.713,00
09	SEKOTR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	511.372.749.414,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan	5.797.083.516,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	517.169.832.930,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	202.452.380.570,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	89.032.896.192,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	291.485.276.762,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	979.493.614.591,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	55.548.033.973,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	-
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	9.999.871.000,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	1.045.041.519.564,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	5.077.003.270,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	5.077.003.270,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	45.073.772.202,00
13.2	Subsektor Kesehatan	243.991.815.346,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	-
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	289.065.587.548,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	751.407.670.957,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	4.942.859.916,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	756.350.530.873,00
15	SEKTOR AGAMA	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	-
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	30.953.654.491,00
	Jumlah Sektor Agama	30.953.654.491,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	34.384.703.694,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	2.937.077.268,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	67.724.464.376,00
16.4	Subsektor Kelautan	172.958.617.825,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	10.321.096.669,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	13.338.390.000,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	301.664.349.832,00
17	SEKTOR HUKUM	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	2.482.507.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	-
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	-
	Jumlah Sektor Hukum	2.482.507.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1	Subsektor Aparatur Negara	270.626.293.797,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	15.928.723.804,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	286.555.017.601,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1	Subsektor Politik	3.684.011.600,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	-
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	185.929.823.526,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	189.613.835.126,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	-
20.2	Subsektor ABRI	912.608.157.474,00
20.3	Subsektor Pendukung	10.414.950.000,00
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	923.023.107.474,00
	JUMLAH	14.385.559.007.733,00

#### Pasal 3

Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp 126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp 127.968.487.756.083,00 (seratus dua puluh tujuh triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3877